



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Telp (0532) 21052 Pangkalan Bun 74112
Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail
bappedakabkobar@yahoo.com

Pangkalan Bun, 15 November 2019

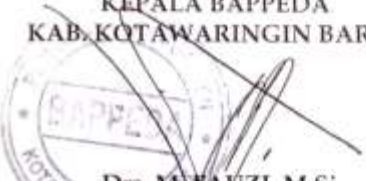
Nomor : 050/629 /Bapp-I/2019
Sifat : biasa
Perihal : Rapat Koordinasi Yurisdiksi

Kepada
Yth. (Daftar terlampir)
di -
PANGKALAN BUN

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2017 - 2022,
dan Pertanian dalam arti luas merupakan Sektor Unggulan, maka kami
mengharap kehadirannya pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 25 November 2019
Pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Kepala Bappeda
Acara : Persiapan Yuridiksi Kelapa Sawit.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BAPPEDA
KAB. KOTAWARINGIN BARAT


Drs. M. FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

**NOTULEN RAPAT KOORDINASI YURISDIKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2019
Pukul : 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Ruang rapat Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
Pimpinan Rapat : Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Balai Taman Nasional Tanjung Puting

- Isu mencegah kebakaran dan isu orang utan
- Bulan Juli 2019 telah mengevaluasi internal
- Kebakaran terjadi karena perburuan oleh masyarakat
- Api yang ada membakar kebun-kebun
- Kebakaran disebabkan oleh masyarakat
- Diplomasi orang utan, pada dokumen kerjasama agar ada orang utan disebutkan dalam perusahaan perkebunan
- Balai TNTP Sudah menyempurnakan zonasi tahun 2015 seluas 100.000 Ha
- Adanya pemberdayaan usaha *coffee shop* dan minyak kelapa sawit oleh ibu rumah tangga (gender)
- Pembuatan kanal-kanal oleh perusahaan atau Pemda
- Kebun ditanam di tanah mineral
- Pemberdayaan masyarakat di Sei Cabang
- Perlindungan penyu
- Orang utan yang paling banyak dan bagus ada di Tanjung Puting
- Revisi zonasi mulai tahun 2012 dilakukan per 5 tahun sekali

2. Dinas Lingkungan Hidup

- Penghijauan dan reboisasi dulu ada di Dishut setelah kewenangan pindah ke Provinsi Program tidak langsung ada di DLH
- Ada kegiatan yang berasal dari dana DBH
- Terkait supervisi kanal, DLH tidak mempunyai peran, yang lebih berperan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, DLH hanya memberikan aturan ke perusahaan terhadap dampak lingkungan, untuk tahap operasional DLH tidak terlibat
- Perijinan lingkungan melalui DLH, pengawasan langsung diawasi oleh SKPD teknis
- Indikator Kinerja Utama DLH terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan serta kini ditambah indeks kualitas air laut yang terdiri dari terumbu karang, padang lamun
- Nilai IKLH Kobar >69 yang sudah melebihi IKLH Nasional, nilai yang membuatnya tinggi yaitu kualitas udara dan air
- DLH mempunyai kewenangan berupa pembuatan Ruang Terbuka Hijau dengan syarat luasan 20% publik dan 10% privat dari luasan wilayah Kabupaten. Jika dilihat, Pangkalan Bun belum mencapai target itu. RTH terdiri planson, hutan kota, taman
- Untuk penghijauan, lahan ada dana DBH DR sebesar Rp. 800 juta yang berupa pengadaan pohon dan hijauan yang bisa masuk pada kegiatan pembuatan RTH
- Badan Restorasi Gambut melalui Dishut Provinsi memiliki kegiatan Pembuatan skat kanal 80 buah dan 50 buah sumur bor
- BRG memiliki aplikasi *prims* untuk mengetahui data dan perkembangan terkini restorasi gambut di 7 prioritas BRG termasuk Kalteng di Kobar ada 10 kawasan hidrologi gambut

- Tahun ini 2019 melalui SK Bupati disetujui dana Rp. 19 Milyar untuk kegiatan penganggulangan karhutla, DLH termasuk di dalamnya dengan dana sebesar Rp. 1,5 Milyar untuk mendapat Dana DBH
- Tahun 2020 Program Penyusunan RPPEG, kajian Indeks LH
- Kab. Kohar ke-2 setelah Kab. Seruyan, RSPO berdasarkan yurisdiksi ada 8 syarat yaitu : tidak ada deforestasi, tidak menanam di areal gambut, tidak ada pembakaran, pengurangan emisi gas rumah kaca, penghormatan terhadap hak petani kecil dan pekerja, tidak menggunakan parakuat (pestisida) yang dilarang uni eropa, peningkatan transparansi dan ketelusuran,
- Kohar wilayah percontohan di Kalteng yaitu Kalimantan forest (NGO), hutan diluar kawasan

3. Bappeda

- Yang diperlukan adalah program kerja untuk menjaga lingkungan serta rencana kerja
- Perlu standar operasional untuk menjaga kelestarian lingkungan (rencana kerja induk)
- Dinas. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membuat Standar Operasional Prosedur dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebakaran hutan
- Kesiapan SKPD DTPHP mempersiapkan yurisdiksi perkebunan kelapa sawit terhadap program kegiatan dan agar dibuat SOP
- Agar masing-masing SKPD membuat SOP dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan kelestarian hutan
- Pertemuan berikutnya agar NGO diundang pada rapat

4. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

- Sosialisasi kepada masyarakat terhadap yurisdiksi (apa itu yurisdiksi sertifikasi?, bagaimana prosedurnya? dan apa saja manfaatnya?)
- Telah dilaksanakan rapat sidang penetapan HGU PT. Kumai sentosa seluas 6.600 Ha di Sei cabang dan 1.200 Ha akan dibangun plasma untuk masyarakat yang juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat terkait sertifikasi
- Ada program integrasi sawit sapi karena ada pelepah sawit yang menjadi sampah perkebunan bisa dijadikan pakan ternak
- RTH, Pangkalan Bun terkendala bahwa kondisi RTH yang ditetapkan dalam Perda RTRWK adalah perumahan
- Ketika kunjungan Dewan Ketahanan Nasional, Informasi Kepala BPBD, Kab. Seruyan memperoleh dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 200 Milyar untuk penanggulangan kebakaran

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tata ruang memberikan pertimbangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Jika perusahaan meminta info ruang akan diberikan oleh DPUPR
- Akan berkoordinasi dengan Balai TNTP

6. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

- Ada kegiatan monitoring ke perusahaan terkait sarpras pencegahan karhutla
- DTPHP memiliki alat damkar sebanyak 1 set yang merupakan bantuan Pemerintah Provinsi, untuk kegiatan memadamkan api
- Ada program dari Pemerintah Pusat berupa bantuan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Sosialisasi pencegahan kebakaran dan pembuatan pos pantau, pos lapangan, melakukan koordinasi dengan SKPD dan perusahaan serta masyarakat tangguh bencana
- Pembentukan masyarakat peduli api

Kesimpulan

- 1) Pertemuan berikutnya adalah menyampaikan program kerja dalam rangka mempertahankan hutan dalam Tata Ruang
- 2) BPBD memastikan SOP ditaati dari waktu ke waktu
- 3) Pertemuan selanjutnya yang lebih besar direncanakan pertengahan Desember, dipimpin oleh Bupati, yang diundang termasuk pengiat lingkungan, materi rapat disiapkan oleh Dinas TPHP